

SKRIPSI

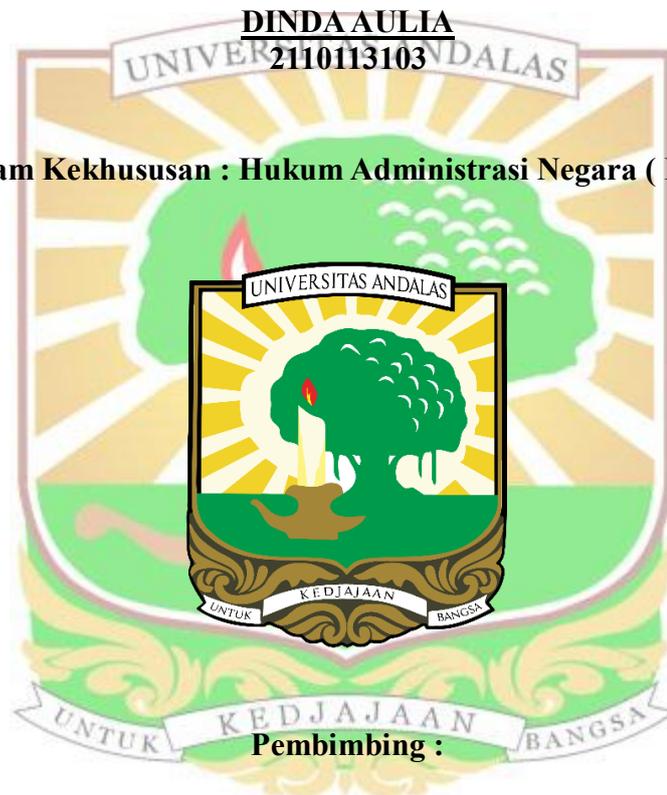
**PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN PADA KEPOLISIAN
RESOR KOTA PADANG**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

DINDA AULIA
2110113103

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Yuslim, S.H., M.H
Hendria Fithrina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2025

No. Reg: 15/PK-VII/II/2025

ABSTRAK

Pemerintah terbentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara adil dan merata. Dengan begitu, negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan layanan kepada setiap warga negara guna memenuhi hak serta kebutuhan dasar masyarakat dalam konteks pelayanan publik. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah mencakup beragam entitas seperti kementerian, departemen, lembaga, dan sebagainya, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengayomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik dalam Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada Kepolisian Resor Kota Padang. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis empiris. Sumber data yang digunakan ialah Penelitian Lapangan (field research) dan Penelitian Kepustakaan (library research) dan Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder serta pengumpulan data menggunakan wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian diperoleh bahwa pelayanan publik pada pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada Kepolisian Resor Kota Padang belum berjalan secara maksimal. Serta dalam penyelenggaraan prosedur terdapat factor yang memengaruhi pelayanan publik yang terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat baik dari segi petugas pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.

